

BANGSA INDONESIA DI TENGAH FENOMENA KEKERASAN DAN KETIDAKADILAN (PERSPEKTIF FILSAFAT PANCASILA)

Robby H. Abror

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

robby_abror23@yahoo.com

Pancasila serves as the state philosophy, way of life, and national ideology in Indonesia. Once the Pancasila as the nation ideology is functionally applied, the balanced life of the nation is present. In reality, Pancasila is abused and politicized in a destructive interest to justify immoral actions. This affected to the people misery, as found in Lapindo case in Sidoarjo and most Indonesian workers abroad. In this scene, Pancasila should be redefined pointing the critical-philosophical mode of reflection. This could be stimulated to gain creative-historical potency constructing Indonesia better.

Kata kunci: Pancasila, Sejarah, TKI/TKW, Lumpur Lapindo, Dehumanisasi

A. Pendahuluan

Dapat dimafhumi bahwa Pancasila mempunyai dua sisi pengertian yang signifikan. Pancasila dapat dipahami sebagai dasar negara sekaligus sebagai ideologi bagi bangsa Indonesia. Di satu sisi, sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan yang berkekuatan yuridis konstitusional. Pancasila juga menjadi landasan ideologis yang harus mampu memberikan orientasi, wawasan, asas, dan pedoman normatif dalam segala

aspek kehidupan bernegara.¹ Dengan demikian, apabila fungsi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dapat diterapkan dengan baik, maka akan terwujud keindahan dalam keteraturan hidup berbangsa dan bernegara. Tetapi dalam praktiknya, terlalu banyak penyimpangan dan pelecehan terhadap Pancasila, sehingga menurut hemat penulis, dibutuhkan refleksi kritis-filosofis atas terjadinya pemiskinan makna Pancasila yang dilakukan oleh berbagai pihak atas kesewenangan mereka dalam menyalahpahami penjabaran konsepsional Pancasila yang seringkali diselimuti pelbagai kepentingan yang ujung-ujungnya selalu menyengsarakan rakyat banyak.

Merefleksikan Pancasila adalah sebetulnya usaha untuk membaca ulang Pancasila secara historis dan mereproduksi maknanya dalam konteks kehidupan kita sekarang. Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta: *panca* yang berarti "lima" dan *syila* yang berarti "batu sendi, dasar, alas atau asas; sebetulnya peraturan tingkah laku yang baik, utama dan penting". Secara historis, Pancasila yang berarti lima aturan kesusilaan (*five moral principle*) kali pertama ditemukan di dalam, dan merupakan ajaran Budha yang wajib ditaati dan ditunaikan oleh para pemeluknya sebagaimana terdapat dalam *Kitab Tri Pitaka* (Tiga Keranjang Besar).² Pancasila kemudian muncul kembali menjelang proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pancasila selanjutnya dipakai sebagai falsafah negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Bung Karno yang kali pertama memperkenalkan kembali istilah tersebut dalam pidatonya di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. Beliau mengusulkan

¹ Soerjanto Poespowardjojo, *Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya* (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 9.

² Di dalam kitab tersebut, tepatnya dalam Kitab *Vinaya Pitaka* dicantumkan lima larangan yang wajib dihindari: larangan membunuh, mencuri, berzina, berbohong serta menghindari makanan dan minuman yang memabukkan. Pada masa Kerajaan Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk, istilah Pancasila masuk dalam kesusasteraan Jawa Kuno, seperti terdapat dalam buku *Negarakertagama* karya pujangga Empu Prapanca sebagai berikut: *Yatnanggegwani Pancasyiila Kertasangskarbhisekaka Karma* (Raja menjalankan kelima pantangan dengan setia). Istilah Pancasila juga terdapat dalam buku *Sutasoma* karya Empu Tantular yang berisi lima larangan: dilarang melakukan kekerasan, mencuri, berwatak dengki, berbohong dan mabuk minuman keras. Musthafa Kemal Pasha, dkk., *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filosofis* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 1-2.

Pancasila sebagai Dasar Negara yang kemudian sistematika dan redaksinya disempurnakan oleh "Panitia Sembilan" pada 22 Juni 1945. Pada 18 Agustus 1945 rumusan Panitia Sembilan, yang kemudian dikenal dengan sebutan rumus Piagam Jakarta, direvisi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sehingga lahirlah rumusan final Pancasila.³

Soekarno adalah satu-satunya orang yang berperan penting dalam merintis, menyebut nama Pancasila, memimpin "Panitia Sembilan" yang melahirkan Piagam Jakarta sampai dengan memimpin PPKI untuk mengesahkannya. Maka sejak disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar (falsafah) negara, pandangan hidup, ideologi nasional, dan ligatur (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Bagi Latif, Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun (*Leitstar*) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya.⁴

Dengan adanya Pancasila, bangsa Indonesia seharusnya telah mempunyai basis moralitas yang jelas dan visioner. Tetapi dalam praktiknya, Pancasila seringkali hanya dijadikan sebagai jargon tanpa mau tahu sejarah, proses terbentuknya dan tujuannya. Terbukti dengan merebaknya fenomena (multi-)kekerasan di sekitar kita yang banyak menyita energi bangsa ini yang seharusnya dapat diarahkan pada kemajuan. Berbagai permasalahan bangsa kita pada masa reformasi menunjukkan bagaimana Pancasila semakin terpinggirkan dan terabaikan dalam kehidupan nyata berbangsa dan bernegara.

Pada masa Orde Baru (Orba), Pancasila telah dijadikan sebagai ideologi tertutup yang hanya boleh ditafsirkan oleh negara. Orba berhasil melegalkan proses itu dengan munculnya Tap MPR No.2/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Kepres No.10/1979 tentang pembentukan Badan Pelaksana Pembinaan dan Pendidikan P4 (BP7) serta munculnya tap MPR No.2/1983 dan UU No.8/1985 yang mengharuskan

³ *Ibid.*, hlm. 2-3.

⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 41.

semua partai politik, golongan karya, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) berasaskan Pancasila. Bagi yang menolak berarti "anti-Pancasila". Sebaliknya, begitu masa reformasi telah bergulir, muncullah legislasi pada tahun 1998-1999 yang membatalkan Tap MPR No.18/1978 tentang P4, dilikuidasinya BP7 serta pencabutan asas tunggal Pancasila bagi partai-partai politik (UU No.2/1999). Akhirnya, UU Sisdiknas No.20/2003 mengeluarkan Pancasila dari mata pelajaran wajib dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Akibatnya tidak sedikit pejabat pemerintah yang *emoh* menyebut peran penting Pancasila karena takut dicap tidak reformis dan bagian dari Orba.⁵

Fakta-fakta tersebut merupakan bagian dari "dinamika" kebangsaan yang bisa jadi akan terus berlangsung di tengah pusaran fenomena kekerasan yang semakin kompleks yang pada gilirannya akan dapat mempengaruhi tafsir bangsa ini terhadap peran penting Pancasila. Beberapa fenomena kekerasan dan ketidakadilan yang pernah terjadi setidaknya menjadi renungan kita bersama untuk dapat mengambil hikmahnya dan terhindar dari kesalahan yang sama sehingga ajakan Yudi Latif untuk "kembali ke rumah Pancasila" sebagaimana tertuang dalam bukunya *Negara Paripurna* dapat benar-benar terwujud. Akan kita lihat beberapa fenomena kekerasan dan ketidakadilan yang tidak sesuai dengan semangat Pancasila, seperti nasib buruk yang menimpa TKI/TKW, luapan lumpur Lapindo akibat kecerobohan yang berdampak menyengsarakan warga Sidoarjo serta perjuangan buruh Marsinah yang tewas mengenaskan akibat penyiksaan berat.

B. Benang Kusut TKI/TKW: Korban Ketidakadilan

Tenaga Kerja Indonesia (TKI), termasuk di dalamnya Tenaga Kerja Wanita (TKW), atau apa yang sering disebut sebagai "Pahlawan Devisa" ini berjuang mencari nafkah di negeri orang dengan harapan meraih penghasilan lebih banyak daripada di negeri sendiri. Tetapi yang seringkali tidak mereka sadari adalah tentang betapa riskan dan sangat beresikonya bekerja di luar negeri jika dilakukan tanpa modal intelektual dan keterampilan yang cukup.

⁵ Antonius Widyarsono, "Peta Permasalahan Pancasila Dewasa ini" dalam Jurnal Filsafat *Driyarkara*. Th. XXXII No.3/2011, hlm. 11-12.

Tidak sedikit TKI yang telah menjadi korban dari kekerasan dan ketidakadilan para majikan mereka serta oleh hukum di negara di mana mereka tinggal yang tidak berpihak terhadap keadilan.

Sekedar contoh, pada 2002 setidaknya sekitar 500 ribu TKI/TKW ilegal harus terusir dari *negeri jiran* Malaysia dan terlunta-lunta sebagai pengungsi. Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, menjadi saksi bagi ratusan nasib TKI/TKW yang mengenaskan dan kondisi keluarga yang sangat memprihatinkan. Mereka benar-benar kehabisan uang dan tidak tahan hidup sengsara, akibatnya sejumlah TKI harus rela menjual anak mereka setidaknya untuk ongkos pulang ke kampung halaman.

Inilah faktanya, seperti marak diberitakan di beberapa stasiun televisi, bahwa saat itu anak-anak balita dijual dengan harga murah, mulai dari Rp. 500 ribu sampai Rp. 1,5 juta di penampungan Sungai Sembilang. Sedangkan kondisi ribuan anak yang tidak terurus dengan baik terkena busung lapar dengan badan kurus dan perut membuncit serta terserang penyakit infeksi saluran pernafasan atas (ISPA). Selain itu, puluhan TKI/TKW meninggal dunia karena kelaparan atau kekurangan pangan, sakit, kurang gizi, tidak mendapat pelayanan kesehatan memadai serta tidak sedikit yang menderita depresi berat.⁶

Sekelumit potret buram nasib TKI/TKW di atas benar-benar menampar muka kita sebagai bangsa Indonesia. Bagaimanapun menjadi TKI merupakan pilihan pekerjaan meski serendah apapun derajatnya. Bukan salah mereka bila pilihan bekerja di negeri orang menjadi salah satu kesempatan yang menggiurkan sekaligus jawaban atas betapa rendahnya angka gaji rata-rata bekerja di negeri sendiri. Dengan begitu pemerintah tidak perlu bertanya mengapa anak-anak bangsa ini lebih senang dan bangga memilih bekerja di luar negeri daripada di negeri sendiri. Jawaban umumnya dapat dikemukakan bahwa bekerja di negeri sendiri selain sulit mendapatkannya karena harus bersaing dengan yang lain, juga minimnya

⁶ Pelbagai fakta lain terkait karut marut nasib TKI/TKW dapat dilihat dalam eksplorasi ringkas oleh M. Arif Nasution dalam tulisannya, *Orang Indonesia di Malaysia: Menjual Kemiskinan, Membangun Identitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

lapangan kerja yang dibuka dan persoalan upah minimum regional (UMR) yang tidak mampu memenuhi tuntutan dan kelangsungan hidup mereka.

Bangsa Indonesia yang bekerja di Malaysia khususnya, sebenarnya adalah bangsa yang memiliki harga diri dan bersedia mempertaruhkan tenaga dan kerja keras demi kehidupan yang lebih menjanjikan. Tetapi jalan yang mereka tempuh tidak seindah seperti yang mereka bayangkan, sebab kewajiban untuk mematuhi dan memenuhi peraturan menjadi TKI/TKW legal adalah persoalan dan beban tersendiri bagi sebagian penggantungan nasib. Karena jalan pintas dengan menerobos aturan-aturan main yang mereka lalui, konsekuensinya mereka sendiri yang harus menanggung akibatnya. Mereka dipulangkan secara paksa, bahkan ada yang dihukum cambuk dengan dalih ilegal dan membandel. Apa yang mereka kerjakan sebenarnya itulah “hasil” perbuatan mereka.

Tamparan keras atas martabat bangsa Indonesia ini membuat Prof. Amien Rais, Ketua MPR kala itu mengingatkan kita semua agar bangsa yang berpenduduk besar ini jangan kelewat *membungkuk-bungkuk*. Komentarnya patut direnungkan dan bangsa Indonesia dapat memperbaiki diri agar tidak lagi diperlakukan seenaknya oleh bangsa lain. Bung Karno juga pernah mengingatkan kita agar jangan menjadi negara pengekspor buruh. Karenanya, bangsa ini harus sadar akan pentingnya membangun mentalitas kerja yang kukuh dengan meningkatkan taraf pendidikan seoptimal mungkin.

Berbagai gambaran keroposnya mentalitas kerja dan rendahnya mutu pendidikan adalah minimnya lapangan kerja yang tersedia dan jumlah PHK yang menambah deretan pengangguran yang telah mencapai 40-an juta orang lebih memberikan dampak sosial yang kejam, kemelaratan dan kriminalitas yang ganas. Belum lagi ketergantungan kita terhadap Dana Moneter Internasional (IMF) dan hutang luar negeri yang tidak masuk akal semakin membebani bangsa ini. Apalagi masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) atau politik uang (*money politics*) merajalela, kuatnya jerat budaya dan struktur feodal, menggilanya budaya konsumerisme, menipisnya rasa tanggungjawab dan tergerusnya nilai-nilai kemanusiaan, meluasnya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dan sikap *cuek* elite politik terhadap arus gelombang global menjadi krisis laten di masa transisi dari otokrasi ke demokrasi ini.

Patut direnungkan pula filosofi yang mengatakan bahwa manusia adalah apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan di dunia diarahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan material untuk hidup. Mereka tentu akan bertingkah laku sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Apabila bangsa Indonesia sudah menyadari apa yang mereka kerjakan, maka mereka harus mematuhi syarat-syaratnya. Menjadi TKI/TKW ilegal sama halnya melanggar syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sebelum menuntut pemenuhan kebutuhan hidup, syarat-syaratnya seharusnya sudah dipenuhi terlebih dahulu. Membayangkan kebutuhan-kebutuhan material untuk hidup tetapi dengan jalan ilegal dan pengetahuan atau pendidikan yang pas-pasan mencerminkan tindakan bodoh dan ceroboh.

Manusia tidak hanya hidup dengan bayangan-bayangan yang menipu. Ia juga harus menyadari realitas dan tuntutan-tuntutan kehidupan dengan segala nilai kompetitifnya. Bangsa yang menggantungkan hidupnya berdasarkan nasib tak ubahnya merelakan dirinya dilibas oleh jaman yang semakin kompetitif, atau bahkan hanya menjadi robot-robot bagi kecanggihan teknologi dan manusia-manusia pintar.

Bangsa Indonesia harus menentukan nasibnya sendiri dengan bekerja keras dan berpikir cerdas dengan meningkatkan kemampuan secara profesional di bidangnya masing-masing serta menambah cakrawala pengetahuan seluas-luasnya agar terlatih untuk hidup penuh disiplin serta siap menghadapi tantangan dan persaingan global. Logikanya, bila bangsa ini bangun dari tidur kebodohnya, tidak perlu disangsikan lagi bahwa tuntutan akan kebutuhan hidup, masa depan yang cerah serta harga diri sebagai bangsa yang terhormat dengan sendirinya akan terpenuhi dan identitas bangsa besar yang sedang terluka ini kembali dapat disembuhkan dengan pengorbanan dan makna kerja keras dan kecerdasan yang mereka persembahkan.

C. Tak Kunjung Tuntasnya Kasus “Lumpur Lapindo”: Lukai Hati Rakyat

Selain fenomena TKI/TKW yang memprihatinkan tersebut, berbagai peristiwa nahas pernah terjadi di penghujung 2006, seperti tenggelamnya Kapal Motor (KM) Senopati yang mengangkut 628 penumpang karena diterjang ombak, jatuhnya pesawat Boeing 737-400 Adam Air bersama 6 awak dan 96 penumpangnya, kereta api anjlok, 189 ribu jamaah haji Indonesia yang kelaparan lantaran terlambatnya ransum makanan selama lebih dari 30 jam yang menyebabkan Menteri Agama dikeroyok oleh jamaah di maktab 39, banjir bandang yang menenggelamkan Jakarta dan menyengsarakan ratusan ribu pengungsi sampai dengan terbakarnya KM Levina I.⁷

Serangkaian berita tersebut menghangat dan cepat dilupakan, tetapi barangkali inilah salah satu bentuk apa yang disebut oleh Pierre Bordieu sebagai “kekerasan simbolik” yang menimpa warga Sidoarjo yang terdampak luapan lumpur Lapindo yang menyembur kali pertama pada 29 Mei 2006. Meskipun berkali-kali diberitakan oleh *TvOne*—stasiun televisi swasta milik pengusaha kaya Aburizal Bakrie—bahwa luapan lumpur itu murni disebabkan oleh bencana alam (karena hampir bersamaan dengan gempa bumi yang melanda Yogyakarta pada 27 Mei 2006). Hal ini diperkuat oleh riset para ilmuwan dari Rusia yang memaparkan penemuan mereka dan ditayangkan berkali-kali oleh *TvOne*. Namun demikian, rakyat Indonesia tampaknya tidak dapat begitu saja melupakan kasus tragedi semburan lumpur Lapindo yang telah merugikan ribuan warga Sidoarjo. Akibatnya, beban para pengungsi semakin berat dan seluruh aktivitas sosial dan ekonomi penduduk Sidoarjo dan sekitarnya menjadi kacau.

Sidoarjo adalah “kota sibuk atau kawasan industri” dengan mobilitas ekonomi yang cukup tinggi karena bertetangga dengan Surabaya, Pasuruan dan Malang, sehingga pantas jadi tumpuan harapan bagi puluhan ribu orang dari luar daerah untuk mengais rizki serta menggantungkan penghidupannya.

⁷ Robby H. Abror, “Bangsa Penuh Derita”, *Media Indonesia*, 12 Maret 2007.

Menjamurnya perusahaan besar dan industri rumah tangga yang tumbuh pesat di *kota udang* ini merangsang para pendatang untuk mengadu nasib.

Tetapi begitu jalan tol Surabaya-Gempol ditutup pascaledakan pipa gas milik Pertamina, praktis kondisi industri di Jawa Timur tertindih beban yang cukup perih, karena terganggunya suplai gas ke puluhan perusahaan yang mempekerjakan ribuan karyawannya. Sejumlah industri dipastikan mencecap dampaknya dan ikut *kolaps*. Para pengusaha di Jawa Timur dihantui rasa was-was dan bersiap menghadapi pailit.

Harapan para pengungsi agar Lapindo sanggup lekas mengatasi semburan lumpurnya hampir saja pupus, karena penjualan Lapindo Brantas Inc ke Freehold Group Ltd mengindikasikan kesan kuat adanya kesengajaan untuk lari dari tanggung jawab, meskipun dibantah Menko Kesra Aburizal Bakrie saat itu. Beruntung Lapindo membatalkan penjualannya dan telah mendata ulang kerugian yang menimpa para korban untuk memperoleh “ganti untung”. Realitas ini disambut dengan tangis haru dan sujud syukur warga serta pejabat teras setempat.

Kendati telah berjanji tidak melepas kewajibannya serta menebus semua kerugian eksekusi semburan lumpur panas di kawasan eksplorasi Banjar Panji-1, kegelisahan warga belum juga surut disebabkan berbelit-belitnya persyaratan menyebalkan yang ditawarkan Lapindo.

Kasus seperti ini sebenarnya tidak dapat dibiarkan. Pemerintah harus berani bertindak tegas dengan menjatuhkan sanksi sekeras mungkin, menghitung kerugian secara detail serta menyikapi masalah ini dengan cerdas. Perlu ada aturan yang jelas yang memungkinkan pemerintah mencabut hak Lapindo agar tidak lagi seenaknya melakukan pengeboran sehingga menjadi pelajaran berharga bagi yang lain.

Wajah keruwetan ini dapat dibahasakan dengan simpel sebagai: satu bencana berjuta masalah. Mulai dari hancurnya infrastruktur yang melumpuhkan denyut ekonomi di Sidoarjo, ribuan rumah rusak akibat terendam lumpur sampai dengan keengganan para investor untuk menanamkan modal mereka.

Kompleksitas persoalan itu tak bisa sepenuhnya dibebankan begitu saja pada pemerintah Sidoarjo hanya karena bencana ini terjadi di daerahnya. Mesti ada penyelesaian kolektif dan konkret yang harus segera direncanakan serta ditindaklanjuti secara integral dan komprehensif. Tentu saja peran

pemerintah pusat sangat besar yaitu melalui agenda-agenda strategis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Langkah strategis dalam jangka pendek yang dilakukan saat itu baru tahap relokasi jalan tol pada Km 37, 38 dan 39 yang babak belur dihantam lumpur sehingga memunculkan ide dari Timnas Penanggulangan Lumpur Lapindo untuk membangun *elevated tol* atau jalan layang di atas jalan arteri sebagai gantinya, ketimbang membikin jalan tol baru yang masih harus berurusan dengan masalah pembebasan lahan. Aliran lumpur yang telah menenggelamkan Desa Kedungbendo, Siring, Jatirejo dan Renokenongo dipastikan kian tak terkendali dan terus menebar ancaman ke wilayah lain, jika benar estimasi berhentinya semburan sampai 31-50 tahun lagi. Oleh karenanya, tindakan mendesak lainnya ialah perlunya proses pemulihan mental dan psikologis para pengungsi, *recovery* perekonomian rakyat dimana industri rumah tangga—seperti tas, koper dan sepatu di Tanggulangin—terancam gulung tikar serta merekonstruksi citra positif yang mencerahkan dan menjanjikan tentang kondusivitas kota Sidoarjo sebagai daerah yang layak bagi perkembangan perbankan, perumahan dan perekonomian.⁸

Derita Sidoarjo bagian tragedi sejarah bangsa ini. Kealpaan yang jelas-jelas menyokong penderitaan bangsa ini wajib diakhiri. Maka jangan ada lagi dusta dengan membuang jauh-jauh despotisme, kenistaan dan penindasan yang hanya akan melahirkan nestapa bagi rakyat kecil tuna kuasa. Semua pihak harus belajar memetik hikmah tiap peristiwa yang terjadi di tahun lalu agar pada tahun ini Indonesia dijauhkan Tuhan dari azab dan pesimisme. Mari bernyali melawan setiap bentuk kezaliman dan kealpaan serta senantiasa berusaha mengejawantahkan amanat-Nya dengan penuh ketulusan untuk memelihara serta memakmurkan bumi-Nya dengan sebaik-baiknya.

Realitas sepahit apapun akan tetap ditanggung dan dijalani dengan gagah, meski menyakitkan, dan sudah barang tentu sampai titik darah penghabisan oleh warga Porong, Sidoarjo. Lapindo adalah pihak yang paling bertanggung jawab karena telah melakukan pengeboran secara sembrono

⁸ *Ibid.*

tanpa menggunakan *casing*, tapi rakyat Sidoarjo yang menanggung semua akibatnya. Rumah, sekolah, perusahaan tempat mereka bekerja, sawah tempat bertani, semuanya lenyap digenangi lumpur panas yang senantiasa terjaga untuk mengancam dan memperluas luberannya sampai ke daerah lain.

Ganti rugi tinggal janji. Hanya segelintir orang yang telah menerimanya, sedangkan ribuan lainnya terkatung-katung dililit nasib murung yang membelit. Andaikata semburan lumpur itu terjadi di ibukota Jakarta, mungkin ceritanya akan lain. Dapat dipastikan jika pemerintah pusat akan langsung turun tangan dan menyelesaikan masalah itu secepat mungkin dengan biaya berapapun dan mendatangkan para ahli dari negara manapun asalkan semburan lumpur itu bisa berhenti secepatnya.

Kita tidak bisa berandai-andai. Sekarang masalahnya telah menjadi kompleks, rumit, dan rentan konflik horizontal. Pemerintah harus belajar cepat dari setiap kasus dan berani untuk menangkap siapapun pelaku yang bertanggung jawab atas peristiwa lumpur Lapindo, meskipun otak di balik proyek tersebut adalah orang penting di jajaran mereka. Jangan biarkan kezaliman dilestarikan demi persahabatan semu dan perkoncoan palsu. Buat apa membiarkan teman bekerja "demi" rakyat, kalau pada kenyataannya telah menindas dan menyengsarakan rakyat.

D. Dehumanisasi: Nilai-nilai Kemanusiaan yang Terkoyak

Masih ingatkah kita pada kasus Marsinah,⁹ seorang buruh perusahaan yang terbunuh dan yang tak pernah terungkap siapa pelakunya? Persis di dekat tempat semburan lumpur Lapindo itulah dahulu terletak perusahaan tempat Marsinah bekerja yang saat ini lenyap digenangi lumpur panas. Tak ada yang menduga jika di tempat itu tergores fakta kezaliman yang tak kunjung tuntas.

Bumi Sidoarjo menjadi saksi bisu atas peristiwa itu. Saat ini, mungkin pemerintah diingatkan kembali akan peristiwa buram yang dahulu pernah

⁹ Perempuan aktivis dan buruh pabrik PT Catur Putra Surya, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, lahir pada 10 April 1969, yang ditemukan tewas pada 8 Mei 1993 di Nganjuk, karena penyiksaan berat.

menyita perhatian publik tersebut. Masihkah ada hati nurani pemerintah untuk menjawab masalah ini? Ataukah telah dilenyapkan oleh lumpur-lumpur dosa dan gemerlap kursi empuk keduniawian, sehingga merasa acuh atau merasa sudah cukup dengan cara mendelegasikan kepada seseorang? Semburan lumpur di Porong, Sidoarjo ini bukan masalah sepele. Lumpur Lapindo tak akan pernah kering untuk dikisahkan dan dipergunjingkan sampai ia berhenti sendiri setelah puluhan tahun ke depan. Tetapi, ingatlah bahwa di sana tetesan air mata para pengungsi telah mengering, dada mereka terasa sesak, mata mereka perih, hati mereka pilu. Mereka menyaksikan sejarah kehidupan yang lenyap secepat kedipan mata. Seolah tak percaya, bahwa masa depan mereka dan anak-anak mereka juga akan turut lenyap.

Mungkin Marsinah masih "hidup", dan ia ingin menggugat para penguasa dan penegak kebenaran dan keadilan di negara hukum ini untuk bertindak seadil-adilnya. Disebabkan oleh itu pula, barangkali bumi ini tengah "murka" karena di tubuhnya ditanami manusia-manusia yang tak berdosa. Bumi ini punya hak untuk "marah"—lihat dalam Al-Quran, bahwa "gunung bisa berjalan", "lempeng bumi bergerak", "angin mampu menghancurkan", dsb—karena ia (bumi) telah dizalimi, dibor seenaknya, dieksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak berperikemanusiaan.

"Pesan" Marsinah kepada bumi telah menemukan puncaknya. Momentum itu terjadi kala para pemodal telah melakukan pengeboran secara *sebrono* sehingga melahirkan multiwajah kesengsaraan dan banjir penderitaan masyarakat serta kaum buruh di Sidoarjo.

Jangan pernah menganggap remeh kaum buruh! Majikan hanyalah sebuah sebutan untuk membedakan dirinya dengan buruh. Kata itu muncul secara absah karena ada buruh. Maka majikan ada, karena buruh ada. Buruh adalah "majikan" yang sebenarnya. Buruh adalah "raja". Eksistensi mereka adalah penyebab adanya orang-orang kaya. Tetapi orang-orang kaya itu tak pernah mengakui jasa kaum buruh. Sehingga lahirlah apa yang disebut dengan penindasan, penistaan, dan dehumanisasi terhadap buruh.

Sebagai warganegara yang mengaku beradab, kita memandang semua manusia itu sama, baik buruh ataupun majikan. Yang kita butuhkan adalah ketulusan hati untuk memberikan rasa keadilan yang sebenarnya, bukan topeng kemunafikan yang hanya mengundang semangat perlawanan dan

konfrontasi yang tak perlu. Jangan ada luka lagi buat bangsa ini. Sebab luka hati tak akan pernah bisa terobati. Kita berharap bahwa kebenaran dan keadilan betul-betul ditegakkan atas dasar nilai-nilai kemanusiaan dan amanat ilahi agar bangsa ini dijauhkan dari kutukan dan pesimisme.

E. Simpulan

Derita yang dialami para TKI/TKW kita dan tragedi yang menimpa warga Porong, Sidoarjo kibat semburan lumpur Lapindo hanyalah secuil contoh tentang potret ketidakadilan yang mengingkari spirit Pancasila yang telah diusung oleh *founding fathers* kita. Pelbagai persoalan yang muncul menjadi ujian sekaligus tuntutan bagi bangsa ini untuk mempedomani jalan hidup kita dan menyikapinya dengan Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dapat dikatakan sebagai ‘pedoman hidup’ atau seringkali dikenal sebagai ‘Filsafat dan Dasar Negara Republik Indonesia’.¹⁰ Karenanya, Pancasila dapat menuntun kita atau mempedomani bangsa ini untuk mengamalkan kelima silanya dengan baik, benar, utuh dan menyeluruh.

Menurut Cak Nur, Pancasila dengan semua silanya yang lima itu adalah suatu kesatuan yang utuh, sehingga pengamalannya pun haruslah utuh.¹¹ Cara pandang model Cak Nur ini dapat memberikan penyadaran kritis kepada bangsa ini bahwa ‘berpancasila’ tidak boleh setengah-setengah, harus dilakukan dengan sepenuh hati. Bahkan Kuntowijoyo menekankan bahwa melaksanakan Pancasila dengan konsekuen, berarti pendekatan menyeluruh, ideologis dan sosiologis sekaligus.¹² Pendekatan menyeluruh akan menghindarkan salah tafsir dan curiga yang berlebihan. Tidak mengherankan apabila begitu banyak celah yang dapat diserang oleh ‘musuh-musuh’ Pancasila atau mereka kelompok-kelompok yang anti-Pancasila untuk ‘menganiaya’ ideologi negara ini sampai mati. Amien Rais mengingatkan:

¹⁰ Musthafa Kemal Pasha, dkk., *Pancasila dalam Tinjauan Historis. Yuridis dan Filosofis*, hlm. 3.

¹¹ Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 239.

¹² Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 213.

Dapatkah Islam menerima Negara Pancasila? Jawabannya tegas: dapat, selama Pancasila itu dimengerti secara wajar dan benar, oleh karena tidak ada satu pun nilai-nilai Pancasila yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Akan tetapi, jika kemudian Pancasila itu ditafsirkan terlalu jauh dan dibumbui dengan pandangan yang aneh-aneh—yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pancasila itu sendiri, seperti ketika ia dilahirkan—maka masalahnya memang bisa lain.¹³

Dalam ‘teks’ di atas, Amien begitu menyadari bahwa Islam sebenarnya sudah cukup untuk menjadi ‘ideologi’ negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam ini. Sehingga ketika Pancasila ditawarkan sebagai ideologi negara, maka Pancasila harus ‘dimengerti secara wajar dan benar’ dalam artian, tidak dipolitisir untuk kepentingan penguasa atau segelintir pihak. Sebaliknya, jika Pancasila diperlakukan dengan semena-mena atau ditafsirkan dalam kerangka syahwat politik tertentu, maka pesan moral beliau menjadi sangat relevan: ‘maka masalahnya bisa lain’. Musuh-musuh Pancasila akan dengan mudah memprovokasi Pancasila sebagai ‘ideologi boneka’ atau ‘ideologi semu’ yang dapat dipakai untuk melanggengkan kekuasaan (*status quo*), mendiskreditkan Islam atau agama tertentu, serta mengusung propaganda Orde Lama/Orde Baru, dsb.

Pikiran yang menggelitik Amien tersebut juga pernah terlintas dalam ungkapan tajam dan lugas Buya Syafii Maarif untuk mengkritisi Pancasila agar eksis lebih inklusif.

Karena itu bila Pancasila memang benar-benar ingin mempunyai dasar yang kukuh bagi eksistensinya—jadi bukan hanya untuk keperluan justifikasi dan legitimasi bagi suatu kekuasaan sementara—maka ia harus membuka diri untuk menerima prinsip-prinsip moral transendental dari al-Quran dan dari Kitab-kitab Suci lainnya yang bersumberkan wahyu.¹⁴

Syafii mengingatkan bahwa inklusivitas menjadi syarat mutlak bagi sebuah eksistensi. Hal ini ditegaskan dalam pernyataannya, ‘maka ia harus membuka diri’. Ada keharusan bagi keterbukaan. Lalu, apa arti keterbukaan

¹³ M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 127-128.

¹⁴ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Masalah Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 152.

bagi Pancasila yang sudah terlanjur dilahirkan? Bukankah sesuatu (teks) yang telah lahir seharusnya telah berdiri bebas dan menjadi konsumsi (kritik) semua pembacanya? Idealnya memang begitu, tetapi baik Syafii maupun Amien sadar dan khawatir akan eksistensi Pancasila yang sangat mudah untuk dicari (-cari) dan diserang sisi-sisi kelemahannya oleh pihak-pihak tertentu yang anti-Pancasila. Jika 'peringatan' dan 'syarat' yang diajukan oleh baik Cak Nur, Kuntowijoyo, Amien Rais maupun Buya Syafii Maarif tidak direnungkan dalam-dalam dan dikaji sungguh-sungguh oleh bangsa ini, oleh semua pembela dan pengusung ideologi negara tersebut, maka 'gerbang kematian' ideologi ini benar-benar sudah di depan mata.

Dengan kata lain, *berpancasila* harus dilakukan dengan 'penuh kesadaran' bukan 'kesadaran penuh kepalsuan' atau 'kesadaran palsu'—istilah yang akrab dalam kritik ideologi Mazhab Frankfurt. Bagi Mannheim, 'kesadaran palsu' itu menghalangi pemahaman komprehensif tentang suatu kenyataan.¹⁵ Kalau benar bahwa pada kenyataannya bangsa ini majemuk, maka kita wajib memahami nilai-nilai kemajemukan itu dengan baik. Realitasnya Tuhan itu memang Esa, maka sebagai seorang yang beriman perlu memahami *tauhid* lebih dalam. Mendidik orang lain (tentang Pancasila), pada dasarnya adalah mendidik diri kita sendiri. Menyuruh orang lain berbuat baik, sebenarnya kita sedang menyuruh diri kita sendiri untuk melakukannya. Maka 'pedoman hidup' ini dapat tetap eksis dan dipegang teguh oleh bangsa ini sepanjang cara memperlakukannya dengan kesadaran kritis dan jauh dari sifat berpura-pura (baca: kesadaran palsu). Dengan kesadaran kritis ini kita dapat mencoba memahami makna terdalam dan *slilit* persoalan yang termuat di balik sila-sila dalam Pancasila ini.

1. *Ketuhanan yang Maha Esa*. Setiap manusia mengenal Tuhannya, meskipun ada sebagian orang mengingkari eksistensi-Nya (seperti: ateisme, marxisme atau eksistensialisme). Salah satu pendasaran (onto-)logis dalam mengimani-Nya dapat disaksikan lewat (perilaku ber-)agama. Agama yang dipahami dengan akal dan diimani dengan hati dalam sebuah proses pematangan keyakinan akan membentuk

¹⁵ Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F. Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 97.

pribadi religius. Whitehead mengatakan bahwa “agama ialah apa yang dilakukan oleh manusia dengan kesendiriannya. Agama adalah kesendirian. Orang yang tak pernah sendiri sesungguhnya tak pernah religius.”¹⁶ Memahami agama dalam pengertian Whitehead setidaknya dapat mbingkai ulang daya kritis kita tentang makna kesendirian itu. Dalam kesendirian, kita dapat merenungkan lebih teliti dan bijaksana akan pesan-pesan moral Tuhan. Whitehead menggoreskan renungannya tentang bagaimana “Prometheus terbelenggu di batu karang, Muhammad menyepi di gurun pasir, Sang Buddha merenung dalam tapa, Anak Manusia tergantung soliter di kayu silang.”¹⁷ ‘Kesendirian’ dalam pengertian Whiteheadian sangat berbeda dengan ‘keramaian’. Keputusan agama yang diambil dalam ‘keramaian’ dapat menumpulkan ketulusan hati untuk memahami agama secara mendalam. Salah satu alasan mengapa terjadi kekerasan atas nama agama, karena ‘keramaian’ telah melenyapkan arti penting ‘kesendirian’ itu. Keramaian memang dapat dijustifikasi sebagai ‘kebersamaan’ tetapi maknanya seringkali ditelikung oleh kepentingan fundamentalisme¹⁸ agama. Keramaian lebih dekat kepada kecerobohan. Kesendirian lebih bermakna kehati-hatian. Kesendirian Whiteheadian mengawal moralitas kita agar kukuh dalam terang toleran, inklusif dan perayaan perbedaan.

2. *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*. Setiap agama menginginkan terciptanya masyarakat madani, masyarakat berkeadaban atau *civil society*. Masyarakat yang bersedia meluruskan setiap upaya pembelokan kebenaran dan menegakkan kembali tiang-tiang kemanusiaan yang dirobahkan oleh kezaliman suatu jaman.

¹⁶ Alfred North Whitehead, *Mencari Tuhan Sepanjang Zaman: Dari Agama-Kesukuan hingga Agama-Universal*, terj. Alois Agus Nugroho (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 5.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 1.

¹⁸ Menurut Caputo, fundamentalisme adalah gairah gila kepada Tuhan, suatu cara yang membalikkan nama Allah menjadi nama teror. Suatu keadaan yang sungguh keterlaluan. John D. Caputo, *Agama Cinta, Agama Masa Depan*, terj. Amrtin Lukito Sinaga (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 131.

Peristiwa biadab tergores di setiap jaman. Karenanya, upaya ‘memanusiawikan manusia’—sebagai selaras dengan hak asasi manusia (HAM)—harus terus diteriakkan agar manusia dapat menghargai eksistensinya sebagai warga negara yang bebas, peduli dan bertanggung jawab terhadap sesamanya.

3. *Persatuan Indonesia*. Perbedaan seringkali melahirkan anarkisme, akibatnya sangat merugikan bangsa kita sendiri. Perbedaan latar belakang, suku, agama, ras dan antar golongan seharusnya dijadikan sebagai kekayaan kita. Anarkisme atau konflik itu muncul karena kegagalan dalam memahami dan menyapa perbedaan. Maka integrasi nasional adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sebagai keharusan semua anak bangsa ini untuk memahami perbedaan dalam kesatuan yang utuh.
4. *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*. Setiap persoalan ada solusinya. Setiap perbedaan pendapat bisa dijumpai dengan jalan bermusyawarah. Nabi Muhammad saw juga mengajarkan dan mengembangkan budaya musyawarah di kalangan para sahabatnya.¹⁹ Musyawarah (*syura*) dituntunkan dengan sangat baik di dalam ajaran Islam.²⁰ Bahkan dalam alam demokrasi, debat

¹⁹ Suatu ketika Nabi saw berkonsultasi dengan para sahabat tentang tujuh puluh tawanan perang badar. Abu Bakar mengusulkan agar mereka dilepaskan saja dengan imbalan tebusan tunai yang akan dapat dimanfaatkan oleh para sahabat. Justru sebaliknya, Umar bin Khattab menyarakan untuk membunuh mereka saja sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan terhadap orang-orang Islam. Nabi saw mengikuti pendapat pertama, sehingga para sahabat melepaskan tawanan dan meminta tebusan kepada mereka. Kemudian turunlah wahyu QS al-Anfal: 67 yang tidak membenarkan pengambilan tebusan dari tawanan. Sewaktu Umar menemukan Nabi dan Abu Bakar menangis, ia bertanya kepada kedua. Nabi saw menjawab bahwa beliau menangisi mereka yang meminta tebusan dari para tawanan, dan seandainya hari itu turun azab maka tidak seorang pun selamat selain Umar dan Saad bin Mu'adz yang mendukung pendapatnya. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 19-20.

²⁰ “Maka karena rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (QS Ali Imran: 159). Garis bawah dari penulis.

terbuka adalah hal yang wajar. Menurut Beetham dan Boyle, demokrasi mengisyaratkan kebhinnekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan di antara para warga negara.²¹ Dalam demokrasi, setiap orang diperlakukan sama dan sederajat.

5. *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Wajah-wajah masyarakat tertindas dan pesimis akan kehidupan mereka dapat mudah ditemui dari Sabang sampai Merauke. Ketidakadilan sosial seolah-olah sudah menjadi bahan pembicaraan tiada habis-habisnya, menjadi hal biasa yang sangat memprihatinkan. Dari masalah TKI/TKW, para korban Lumpur Lapindo, jutaan rakyat yang masih belum dapat hidup layak, bandingkan dengan proyek megah pembangunan gedung DPR/MPR, Kasus Bank Century yang tidak jelas penyelesaiannya, penggelapan uang Negara triliunan rupiah, penebangan hutan, penjarahan ikan, kasus Freeport MacMoran di Papua, dsb. Kekayaan negara yang seharusnya dapat dinikmati oleh segenap rakyat Indonesia lenyap seketika di tangan penguasa yang bermental *inlander*, yang justru merasa nikmat dalam ketergantungan.²² Memerangi kemiskinan, pengangguran, dan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) harus menjadi prioritas utama pemerintah dan kita semua untuk mewujudkan dengan sungguh-sungguh sila kelima ini.

Demikianlah, dengan berpedoman pada sila-sila dalam Pancasila tersebut, diharapkan kita dapat semakin memperteguh sikap dan jati diri keindonesiaan kita, memperluas pemahaman kita akan makna kemajemukan, mempererat tali persaudaraan antar sesama anak bangsa, menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan, menghormati keputusan bersama dalam

²¹ David Beetham dan Kevin boyle, *Demokrasi: 80 Tanya-Jawab*, terj. Bern. Hidayat (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm.23.

²² Menurut Amien, secara harfiah, "*inlander*" berarti pribumi atau anak negeri. Di jaman penjajahan, istilah itu digunakan secara sinis-sarkastik buat anak-anak bangsa yang penakut, merasa inferior di depan penjajah Belanda, selalu jadi pecundang serba "*nrimo*" dan bodoh. M. Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!* (Yogyakarta: PPSK Press, 2008), hlm. 139.

musyawarah, serta bertekad kuat menjadi bangsa yang mandiri dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Daftar Pustaka

- Abror, Robby H. "Bangsa Penuh Derita", *Media Indonesia*, 12 Maret 2007.
- Beetham, David dan Kevin Boyle. *Demokrasi: 80 Tanya-Jawab*, terj. Bern. Hidayat (Yogyakarta: Kanisius, 2000).
- Caputo, John D. *Agama Cinta, Agama Masa Depan*, terj. Amrtin Lukito Sinaga (Bandung: Mizan, 2003).
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1998).
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2011).
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Masalah Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1996)
- Madjid, Nurcholish. *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1997).
- Mannheim, Karl. *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F. Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1991).
- Nasution, M. Arif. *Orang Indonesia di Malaysia: Menjual Kemiskinan, Membangun Identitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Pasha, Musthafa Kemal, dkk. *Pancasila dalam Tinjauan Historis. Yuridis dan Filosofis* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003).
- Poespowardjojo, Soerjanto. *Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya* (Jakarta: Gramedia, 1994).
- Rais, M. Amien. *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!* (Yogyakarta: PPSK Press, 2008).
- Rais, M. Amien. *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1995).
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993).

Whitehead, Alfred North. *Mencari Tuhan Sepanjang Zaman: Dari Agama-Kesukuan hingga Agama-Universal*, terj. Alois Agus Nugroho (Bandung: Mizan, 2009).

Widyarsono, Antonius. "Peta Permasalahan Pancasila Dewasa ini" dalam *Jurnal Filsafat Driyarkara*. Th. XXXII No.3/2011.
